

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan mengenai kesimpulan dan rekomendasi dari penulisan skripsi yang berjudul “Pandangan Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis dalam Perkembangan Politik Indonesia Tahun 1950-1965”. Kesimpulan merujuk pada pembahasan bab sebelumnya berdasarkan kepada rumusan masalah yang telah disepakati.

5.1 Kesimpulan

Permasalahan yang diangkat dan menjadi fokus dalam penelitian ini mengenai bagaimana Pandangan Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis dalam Perkembangan Politik Indonesia tahun 1950-1965. Kesimpulan ini memaparkan beberapa pokok pikiran yang merupakan inti dari permasalahan yang telah dikaji oleh penulis. Adapun kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

Pertama, latar belakang kehidupan Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis. Keduanya merupakan tokoh yang berasal dari Sumatra dengan suku yang berbeda. Rosihan Anwar berasal dari suku Minangkabau yang memiliki darah keturunan Jawa dan Mochtar Lubis berasal dari Mandailing. Keduanya merupakan anak dari ayah yang bekerja sebagai pamong praja pada masa pemerintah kononial Belanda. Kedua orang tuanya memiliki perhatian terhadap bidang pendidikan, Rosihan Anwar mendapatkan pendidikan bergaya Barat dan Mochtar Lubis pernah mengenyam pendidikan di sekolah yang bergaya Barat dan pernah juga merasakan pendidikan dari bangsa Indonesia. Pendidikan formal yang diperoleh kedua tokoh tersebut berpengaruh terhadap penerapan adat istiadat dikeluarganya masing-masing. Kebiasaan masyarakat Minangkabau ketika dalam keluarga memiliki anak laki-laki maka harus tinggal di surau, setelah selesai sekolah Rosihan Anwar biasanya pergi ke surau untuk menuntut ilmu agama. Sedangkan Mochtar Lubis yang hidup dalam keluarga bangsawan Mandailing tidak terlalu menerapkan adat istiadatnya, ketika orang tuanya menjodohkan Mochtar Lubis dengan kerabatnya, ia menolak dan memilih untuk pergi ke Jakarta. Selain berdampak kepada adat istiadat, riwayat pendidikan yang kedua tokoh ini tempuh

berpengaruh terhadap munculnya rasa nasionalisme. Rosihan Anwar berada dalam lingkungan Barat yang dituntut untuk membaca dan menghafal sehingga ia tidak memiliki waktu dan ketertarikan untuk membicarakan masalah-masalah politik pada masa pergerakan nasional. Berbeda halnya dengan Mochtar Lubis yang bersekolah di sekolah Indonesia, ditekankan oleh guru-gurunya akan pentingnya kemerdekaan sehingga ia merasa bahwa nasionalisme dan semangat memperjuangkan kemerdekaan itu sangat diperlukan. Keterlibatan kedua tokoh ini dalam dunia jurnalistik dimulai ketika revolusi dimana Rosihan Anwar bertemu dengan Soedjatmoko dan mendirikan majalah *Siasat*, disusul kemudian dengan terbitnya Surat kabar *Pedoman*. Beberapa hari setelah pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia, harian *Indonesia Raya* terbit yang dipimpin oleh Mochtar Lubis. Pandangan kedua tokoh ini tidak jarang tergambar dalam surat kabarnya masing-masing dan memiliki gaya tersendiri dalam menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat. Selain aktif dalam bidang jurnalistik kedua tokoh ini juga aktif dalam dunia Seni. Rosihan Anwar meskipun semasa sekolah lebih mendalami karya sastra terutama Eropa, tetapi setelah ia dewasa lebih aktif dalam dunia sandiwara dan perfilman bersama dengan Usmar Ismail. Mochtar Lubis lebih tertarik kepada menulis cerita yang menghasilkan beberapa novel dengan latar belakang sejarah dan kehidupan masyarakat pada umumnya.

Kedua, Pandangan Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis terhadap konsep Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin. Rosihan Anwar menilai bahwa konsep Demokrasi Liberal tidak selalu memiliki makna yang negatif karena ia melihat bahwa untuk mencapai cita-cita menjadi negara demokratis maka harus ditempuh dengan langkah-langkah yang demokratis. Ketika konsep tersebut diterapkan banyak terjadi masalah seperti peristiwa 17 Oktober 1952, pergantian kabinet yang cepat dan daerah yang kecewa dengan pemerintah pusat. Hal tersebut mendorong penguasa untuk mengeluarkan status darurat perang yang mengawasi segala sektor kehidupan sehingga ruang untuk mengemukakan pendapat tidak bisa sesuai kehendaknya. Optimisme Rosihan Anwar terhadap penerapan konsep Demokrasi Liberal mulai mengalami degradasi karena ia melihat bahwa arah politik di Indonesia sudah mulai mengarah kepada gaya kepemimpinan yang otoriter. Sedangkan Mochtar Lubis, sejak awal

diberlakukannya konsep tersebut ia menyatakan tidak sepakat dengan pemberlakuan konsep Demokrasi Liberal karena Indonesia belum memiliki sumber daya manusia yang siap untuk menjalankan syarat-syarat sebagai negara demokrasi. Ketidak sepakatan Mochtar Lubis terhadap konsep tersebut semakin kokoh ketika tahun 1957, pemerintah mengeluarkan peraturan status darurat perang yang membatasi ruang gerak masyarakat dan begitu juga dengan Mochtar Lubis yang harus berada dibalik jeruji penjara karena ketidak sepakataanya dengan pemerintah. Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis tidak setuju dengan penerapan Demokrasi Terpimpin karena kedua tokoh ini menilai bahwa dengan menggunakan konsep tersebut maka menghilangkan cita-cita negara demokrasi. Tokoh-tokoh ini berpendapat bahwa dengan diterapkannya konsep tersebut maka memberikan peluang kepada penguasa untuk bertindak secara otoriter. Kekhawatiran tersebut menjadi kenyataan, ketika tindakan Presiden membubarkan parlemen dan menggantikannya dengan membentuk parlemen yang baru. Hal yang tidak disepakati oleh kedua tokoh ini adalah pengaruh PKI di pemerintahan. Rosihan Anwar menilai bahwa PKI dengan ideologi komunisnya akan melakukan beragam cara untuk memperoleh tujuannya. Sedangkan Mochtar Lubis berpendapat bahwa infiltrasi yang dijalankan PKI itu memiliki tujuan untuk menghancurkan dan membina diktator. Kedua-duanya memiliki pendapat yang sama dengan menolak pengaruh PKI yang ikut terlibat dalam peta politik di Indonesia, bahkan ketika penerapan demokrasi terpimpin partai ini menjadi salah satu kekuatan besar yang berdampingan dengan Soekarno dan Tentara.

Ketiga, Pandangan Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis terhadap kebebasan pers di Indonesia. Kedua tokoh ini berpandangan, jika pers ingin menjalankan fungsinya dengan baik maka harus ada kebebasan yang diberikan kepada pers disertai dengan bertanggung jawab. Rosihan Anwar memperjuangkan kebebasan pers dengan melihat situasi dan kondisi, meskipun ia berjuang untuk kebebasan pers tetapi jangan sampai merugikan pihak lain. Contohnya ketika ia memimpin *Pedoman* ia selalu memperhitungkan ketika mengeluarkan suatu pemberitaan apakah akan berdampak pada surat kabarnya. Ia menilai bahwa kebebasan pers juga harus realistis dengan para karyawan yang terlibat dalam *Pedoman* yang memerlukan pekerjaan sehingga dalam beberapa hal ia juga pernah berkompromi

dengan penguasa. Ketika akhir tahun 1960, Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) mengeluarkan 19 pernyataan yang mendukung politik pemerintah dan Rosihan Anwar menandatangani secepatnya sempat menimbulkan konflik dengan Mochtar Lubis. Mochtar Lubis menilai bahwa Rosihan Anwar sudah melanggar kebebasan pers yang selama ini mereka perjuangkan. Prinsip yang dipegang oleh Mochtar Lubis adalah tidak melakukan kompromi apapun. Surat kabar *Indonesia Raya* dijuluki sebagai surat kabar pembongkar aib di Jakarta. Hal tersebut karena Mochtar Lubis sebagai pemimpin redaksi tidak segan-segan untuk memberitakan informasi yang tidak diharapkan oleh pemerintah, pejabat-pejabat bahkan Presiden sehingga konsekuensi yang harus diterima dalam memperjuangkan kebebasannya itu ia harus mendekam didalam rumah tahanan dan sering mengalami siklus tangkap lepas. Sikap Mochtar Lubis yang tegas terhadap kebebasan pers memicu konflik di internal *Indonesia Raya*. Hasjim Mahdan yang mengelola administrasi surat kabar tersebut meminta kepada Mochtar Lubis agar tidak melakukan pemberitaan sensasional yang berdampak kepada kelangsungan *Indonesia Raya*. Namun, Mochtar Lubis menyatakan bahwa yang dilakukannya adalah mengungkapkan informasi yang apa adanya. Kedua tokoh ini menyadari bahwa kebebasan pers yang hakiki sulit tercapai tetapi yang perlu ditekankan oleh kedua tokoh ini sebagai seorang wartawan adalah sampaikanlah informasi apa adanya.

Keempat, orientasi politik Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis selama tahun 1950-1965 memiliki perbedaan. Rosihan Anwar adalah seorang sosialis yang telah menghabiskan banyak waktu untuk membaca buku-buku mengenai sosialisme. Ketika bertemu dengan Soedjatmoko yang merupakan simpatisan dan kemudian jadi anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI) merasa ada kesamaan pandangan sehingga Rosihan Anwar juga menjadi simpatisan dari partai tersebut. Ia memberikan ruang kepada PSI dan tokoh-tokohnya untuk menyalurkan ide-ide politik mereka melalui surat kabar yang dipimpinnya *Pedoman*. Pada tahun 1950-an, Rosihan Anwar sempat merasakan politik praktis dalam pemilu 1955, ketika ia dicalonkan sebagai anggota konstituante yang berasal dari PSI dengan mewakili daerah Palembang namun sayangnya tidak lolos. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi dukungan Rosihan Anwar terhadap PSI. Bahkan ketika PSI dibubarkan, Rosihan Anwar mempertanyakan kepada penguasa pada waktu itu

kenapa PSI dibubarkan dengan alasan tokoh-tokoh PSI ikut terlibat dalam pemberontakan dan bagaimana juga dengan partai politik lain yang juga ikut dalam pemberontakan kenapa tidak mendapatkan nasib yang sama. Ia juga dikenal dekat dengan tokoh sentral PSI yang tidak lain adalah Sjahrir. Sebagai seorang pengagum Sjahrir, Rosihan Anwar selalu memberikan ruang tersendiri dalam surat kabar atau buku catatannya, termasuk ketika Sjahrir menjadi tahanan politik pada waktu pemerintahan Soekarno. Ia mencatat bagaimana perkembangan Sjahrir selama dalam tahanan termasuk ketika Sjahrir sakit. Sedangkan Mochtar Lubis, orientasi politiknya lebih mendukung militer. Dukungan tersebut dapat dilihat dalam peristiwa 17 Oktober 1952, Mochtar Lubis mendukung tuntutan sebagian perwira yang meminta kepada Presiden agar parlemen di bubarkan. Pada saat itu Mochtar Lubis mendukung arah politik dari A.H. Nasution, namun Nasution setelah peristiwa tersebut arah politiknya mengikuti Soekarno. Mochtar Lubis kemudian memberikan dukungannya di pusat kepada kolonel Zulkifli Lubis dengan memuat surat-surat pribadinya kedalam *Indonesia Raya*. Mochtar Lubis juga bersimpati dengan pemberontakan di daerah, ia juga melihat bahwa pemerintah pusat sibuk untuk mengatur kehidupan elit politik sehingga masalah-masalah di daerah kurang diperhatikan. Selain dekat dengan militer Mochtar Lubis juga dekat dengan partai politik terutama PSI dan Masyumi. Kedekatannya dengan Masyumi lebih dikarenakan pekerjaannya sebagai seorang wartawan yang menuntut untuk selalu melakukan konfirmasi dalam pemberitaan sehingga dengan sendirinya kedekatan itu terbangun terutama dengan Moh. Natsir. Sedangkan kedekatannya dengan PSI karena ia setuju dengan tujuan PSI yang menghargai martabat manusia tetapi ia menilai bahwa tujuan yang diharapkan partai tidak berjalan dengan lancar karena gaya hidup anggota-anggota partai politik tersebut yang mencirikan gaya intelektual perkotaan dan tidak bisa mendekati diri dengan rakyat.

5.2 REKOMENDASI

Penelitian ini berfokus kepada pandangan Mochtar Lubis terhadap perkembangan politik di Indonesia selama kurun waktu 1950-1965 saja. Sehingga selanjutnya penulis berharap ada pengembangan penelitian yang memiliki sudut pandang berbeda terutama kiprah kedua tokoh tersebut dalam bidang seni, baik

sastra atau perfilman. Berikut ini merupakan beberapa rekomendasi yang diajukan, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, rekomendasi untuk lembaga UPI, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wahana menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pandangan dan sikap Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar dalam melihat kondisi politik Indonesia yang dilihat dari sudut pandang sebagai seorang wartawan dan pandangan kedua tokoh ini dalam perkembangan kebebasan pers di Indonesia.

Kedua, untuk sekolah sebagai salah satu referensi dalam materi pelajaran sejarah, baik yang menggunakan kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013. Dalam Kurikulum KTSP materi mengenai Demokrasi Liberal dan Terpimpin berada di kelas XII sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) 1.4 yaitu menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan. Dalam Kurikulum 2013, materi mengenai Demokrasi Liberal dan Terpimpin ada di kelas XII sesuai dengan Kompetensi Dasar 3.3 mengevaluasi perkembangan kehidupan politik, sosial dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan 3.4 mengevaluasi perkembangan kehidupan politik, sosial dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Sehingga siswa tidak hanya belajar mengenai sistem politik, sosial dan ekonomi saja. Siswa dapat memahami bagaimana peranan pers pada periode tersebut dan tokoh-tokoh pers yang memiliki peranan penting dalam media massa pada periode tersebut dan dapat meneladani nilai-nilai positif yang dimiliki oleh Rosihan Anwar dan Mochtar Lubis.

Ketiga, untuk peneliti selanjutnya sebagai salah satu rujukan apabila ada yang ingin menulis mengenai Rosihan Anwar atau Mochtar Lubis. Peneliti selanjutnya dapat menuliskan secara mendalam mengenai pandangan Rosihan Anwar maupun Mochtar Lubis dalam periode yang berbeda seperti masa pergerakan atau revolusi. Peneliti selanjutnya dapat membandingkan kedua tokoh ini dengan tokoh lain seperti Pramoedya Ananta Toer, atau membandingkan surat kabar *Pedoman, Indonesia Raya* dengan surat kabar lainnya seperti *Suluh Indonesia, Keng-Po, Berita Yudha, Merdeka, Abadi* dan surat kabar lainnya.